



**POTRET PERKEMBANGAN MOCKUP KOPERASI DESA MERAH PUTIH
SEBAGAI MODEL PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN
DI KOTA SAMARINDA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Zulkifli¹, Reslianty Rachim²

Universitas Widyagama Mahakam, Samarinda

zkartanegara@gmail.com, reslyrachim@gmail.com

Abstract

This study aims to portray the development of the Mockup Village Cooperative (Kopdes) Merah Putih in Samarinda City and Kutai Kartanegara Regency. The research focuses on the application of cooperative principles, member participation, organizational governance, innovation, and the role of government programs and local potential in fostering cooperative independence. A descriptive qualitative approach was employed, using interviews, observations, and document studies, and analyzed with Miles & Huberman's model. The findings indicate that Kopdes Merah Putih in Samarinda is more progressive in digitalization and strengthening SME business networks, while in Kutai Kartanegara it focuses more on agriculture and members' basic needs. Member participation is relatively active in operational activities, although involvement in strategic decision-making remains limited. Cooperative governance has begun to adopt transparency and accountability principles, yet still requires improvement, particularly in digital aspects. The study concludes that Kopdes Merah Putih has the potential to serve as a model of modern village cooperatives if supported by enhanced member capacity, sound governance, and effective use of digital technology.

Keywords: *village cooperative, member participation, governance, digitalization, local economic empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret perkembangan Mockup Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip koperasi, tingkat partisipasi anggota, tata kelola organisasi, inovasi, serta dukungan program pemerintah dan potensi lokal dalam mendorong kemandirian koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kopdes Merah Putih di Samarinda lebih progresif dalam digitalisasi dan penguatan jejaring usaha UMKM, sedangkan di Kutai Kartanegara lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan kebutuhan dasar anggota. Partisipasi anggota cukup aktif dalam kegiatan operasional, meskipun keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Tata kelola koperasi telah mulai menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meski masih perlu penguatan, terutama dalam aspek digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi model koperasi desa modern apabila didukung dengan peningkatan kapasitas anggota, tata kelola yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital.

Kata Kunci: *koperasi desa, partisipasi anggota, tata kelola, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi lokal*

PENDAHULUAN

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Di Kalimantan timur ditetapkan dua desa launching diantaranya koperasi kelurahan merah putih (KKMP) Lempake dan koperasi desa merah putih (KDMP) tanah datar.

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda merupakan KKMP yang ditunjuk menjadi percontohan (mockup) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada peluncuran (launching) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2025 dari Desa Bentengan Kecamatan Wonosari kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sebagai Langkah untuk memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi warga.

KKMP Lempake berada pada wilayah kelurahan yang memiliki potensi utama pertanian padi sawah dan peternakan domba. Sehingga KKMP Lempake berupaya mengoptimalkan potensi tersebut dalam pengembangan bisnis usaha koperasi.

Wilayah Kelurahan Lempake juga menjadi salah satu dari kelurahan yang masuk pada program Brigade Pangan Kecamatan Samarinda Utara. Selain itu, terdapat sejumlah Kelompok Tani yang berfokus pada pengembangan peternakan Domba. Sehingga keberadaan program tersebut sangat mendukung pengembangan bisnis usaha koperasi untuk penguatan kemandirian pangan hulu-hilir dan ekonomi warga Lempake dan sekitar.

Dikabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Daerah melalui program Koperasi Merah Putih (KMP) menempatkan koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi desa/kelurahan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 237 Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan terlembagakan di seluruh wilayah Kukar, dengan Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak menjadi salah satu pionir KMP di Kalimantan.

Momentum penting tercatat pada kunjungan kerja Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, pada Senin 21 Juli 2025, di Desa Tanah Datar. Pada kesempatan tersebut, Bupati tidak hanya meninjau langsung aktivitas Koperasi Merah Putih, tetapi juga secara resmi melakukan **launching Koperasi Merah Putih se-Kukar**, menyerahkan bantuan sektor pertanian, meresmikan **BRI Link**, serta menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Koperasi Merah Putih Tanah Datar. Dukungan pemerintah daerah juga diperkuat dengan kolaborasi bersama PT Lana Harita Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan Kukar, yang menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, hingga sekolah-sekolah (SD-SMP).

Koperasi Merah Putih bukanlah sebagai pesaing usaha masyarakat, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berfungsi menampung, mengelola, dan memasarkan hasil pertanian maupun usaha produktif lainnya. Bahkan, pemerintah pusat telah menitipkan tiga jenis usaha strategis kepada koperasi ini, yakni sebagai distributor elpiji 3 kg, perbankan (BRI Link), dan distributor pupuk bersubsidi, yang diharapkan dapat memperkuat fiskal desa.

Selain itu, program pembangunan Kukar melalui Kukar Idaman Terbaik juga sejalan dengan penguatan koperasi, dengan misi setiap kecamatan memiliki minimal satu industri, peningkatan plafon Kredit Kukar Idaman, serta mendorong desa-desa potensial untuk mempersiapkan produk ekspor dalam menghadapi misi dagang internasional pada tahun 2026. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi penurunan kontribusi sektor sumber daya tak terbarukan, dengan memperkuat sektor pertanian dalam arti luas dan ekonomi kreatif.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa koperasi berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, meskipun efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, tata kelola, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Misalnya, penelitian Suryanto (2018) menemukan bahwa kelembagaan koperasi di daerah masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan transparansi. Sementara itu, studi dari Handayani (2020) menunjukkan bahwa koperasi yang berhasil bertransformasi ke arah digital mampu meningkatkan pelayanan anggota dan daya saing usaha. Penelitian lain oleh Wahyuni (2021) menekankan pentingnya model koperasi percontohan (mockup cooperative) sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan koperasi yang lebih modern.

Namun demikian, kebanyakan studi tersebut masih bersifat umum dan belum banyak menyoroti peran koperasi desa sebagai prototipe (mockup) dalam konteks lokal, khususnya di Kalimantan Timur. Padahal, perbedaan karakteristik wilayah perkotaan seperti Kota Samarinda dan pedesaan seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan gambaran unik tentang bagaimana koperasi desa berkembang sesuai potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Di sinilah terdapat gap penelitian, yaitu keterbatasan kajian empiris mengenai perkembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai koperasi percontohan di dua wilayah berbeda tersebut.

Permasalahan penelitian yang muncul adalah bagaimana potret perkembangan mockup Koperasi Desa Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perkembangannya, serta bagaimana peran program pemerintah dan dinamika lokal dalam mendukung transformasi koperasi tersebut menjadi lebih modern, sehat, dan berbasis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan ilmiah berupa pemetaan perkembangan koperasi desa percontohan dengan membandingkan dua wilayah berbeda, yaitu perkotaan dan pedesaan. Kajian ini tidak hanya menambah literatur mengenai pengembangan koperasi, tetapi juga dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam merumuskan strategi penguatan koperasi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret perkembangan mockup Koperasi Desa Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengidentifikasi peran program pemerintah dan kearifan lokal dalam memperkuat transformasi koperasi desa menuju koperasi modern.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Hendar (2010), koperasi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan badan usaha lain, karena kepemilikan dan pengelolaannya bersifat demokratis, berbasis partisipasi anggota, serta menekankan pada pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil berdasarkan jasa anggota. Dengan demikian, koperasi dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi yang dikemukakan oleh International Cooperative Alliance (ICA, 1995) meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan secara demokratis.
3. Partisipasi ekonomi anggota.
4. Otonomi dan kemandirian.
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerja sama antar koperasi.
7. Kepedulian terhadap komunitas

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan pengembangan koperasi, termasuk dalam Mockup Koperasi Desa Merah Putih di Samarinda dan Kutai Kartanegara.

Mockup Koperasi Desa Merah Putih

Mockup Koperasi Desa Merah Putih merupakan program koperasi berbasis desa yang dikembangkan sebagai model (mockup) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi. Program ini menekankan pada penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta penciptaan ekosistem ekonomi berbasis gotong royong.

Dalam konteks Samarinda, Mockup Koperasi Desa Merah Putih berfokus pada pengembangan UMKM, usaha simpan pinjam, dan distribusi kebutuhan pokok. Sedangkan di Kutai Kartanegara, program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal desa seperti pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil bumi.

Teori Koperasi (Rochdale Principles)

Prinsip koperasi pertama kali dirumuskan oleh Rochdale Pioneers (1844) di Inggris, yang menjadi dasar koperasi modern. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka,
2. Pengendalian demokratis oleh anggota,
3. Partisipasi ekonomi anggota,
4. Otonomi dan kemandirian,
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi,
6. Kerja sama antar koperasi,
7. Kepedulian terhadap komunitas

Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih menerapkan nilai dasar koperasi dalam praktiknya. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya organisasi ekonomi, melainkan juga gerakan sosial yang berlandaskan nilai kebersamaan, demokrasi, dan kepedulian sosial. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar koperasi diterapkan dalam pengelolaan, terutama terkait dengan partisipasi anggota, transparansi pengelolaan, serta kontribusinya terhadap masyarakat sekitar.

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

Menurut Blakely & Leigh (2013), pembangunan ekonomi lokal menekankan pada partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Fokus utamanya adalah bagaimana sebuah wilayah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, koperasi desa berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat lokal. Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai motor pembangunan ekonomi berbasis desa, karena mampu menyalurkan modal, mengelola usaha bersama, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal.

Prinsip ini penting untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Dalam konteks penelitian, teori ini membantu menganalisis bagaimana Koperasi Desa Merah Putih menjalankan tata kelola organisasi yang sehat, sehingga dapat menjadi mockup/percontohan koperasi modern yang bisa direplikasi di daerah lain.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menekankan bahwa perkembangan Mockup Koperasi Desa Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh:

1. Kelembagaan koperasi (struktur organisasi dan tata kelola)
2. Partisipasi anggota (peran aktif dalam simpanan, RAT, dan kegiatan usaha)
3. Dukungan pemerintah dan mitra eksternal (pelatihan, pendampingan, akses permodalan)
4. Pemanfaatan teknologi digital (administrasi, keuangan, pemasaran)
5. Penguatan potensi ekonomi lokal (UMKM di Samarinda, potensi pertanian dan perikanan di Kutai Kartanegara)

Kajian mengenai perkembangan koperasi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian memberikan gambaran penting mengenai dinamika koperasi, baik dari aspek kelembagaan, partisipasi anggota, maupun kontribusinya terhadap ekonomi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2018) menemukan bahwa perkembangan koperasi desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi anggota serta kemampuan manajerial pengurus. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan anggota dan semakin baik tata kelola organisasi, maka koperasi akan lebih mudah berkembang dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Rahman dan Wulandari (2019) dalam penelitiannya mengenai koperasi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa koperasi desa mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, terutama sektor pertanian dan kerajinan. Namun, mereka menekankan bahwa rendahnya akses terhadap teknologi dan keterbatasan jaringan pemasaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan koperasi berbasis desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maryani (2020) menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan koperasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan dari Dinas Koperasi dapat meningkatkan kapasitas pengurus, meskipun dalam praktiknya keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen internal anggota koperasi.

Selain itu, Hidayat (2021) menekankan pentingnya digitalisasi koperasi di era ekonomi modern. Ia menemukan bahwa koperasi yang mulai mengadopsi sistem digital dalam pencatatan

transaksi, manajemen usaha, hingga pemasaran produk, menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dan lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Namun, adopsi digital ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia di tingkat akar rumput.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, hasil penelitian ini mengenai Mockup Koperasi Desa Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kesamaan sekaligus perbedaan. Sama halnya dengan temuan Sutrisno (2018) dan Rahman & Wulandari (2019), partisipasi anggota dan kapasitas manajerial memang menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan dinamika antara koperasi di perkotaan (Samarinda) yang lebih fokus pada pengembangan UMKM dan simpan pinjam, dengan koperasi di wilayah pedesaan (Kutai Kartanegara) yang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur sebelumnya dengan memberikan gambaran kontekstual mengenai bagaimana koperasi beradaptasi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, sekaligus mempertegas pentingnya dukungan digitalisasi dan kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat kemandirian koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dan menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian: Koperasi Desa Merah Putih di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Subjek penelitian meliputi pengurus koperasi, anggota koperasi aktif, pemerintah daerah yang membidangi koperasi, serta tokoh masyarakat. Pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2019) bahwa teknik ini tepat digunakan untuk penelitian kualitatif karena menekankan pemilihan informan yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti.

Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada:

1. Penerapan prinsip koperasi (Rochdale Pioneers, 1844; ICA, 1995).
2. Partisipasi anggota koperasi (Arnstein, 1969).
3. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal (Blakely & Leigh, 2013).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2017), dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus, anggota, dan pihak pemerintah.
2. Observasi partisipatif, untuk mengamati kegiatan operasional koperasi secara langsung.
3. Studi dokumentasi, berupa laporan keuangan, notulen rapat, arsip, dan dokumen resmi.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* (Sugiyono, 2019). Peneliti dibantu dengan pedoman wawancara, daftar cek observasi, dan catatan lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga langkah:

1. Reduksi data, yaitu pemilihan dan pemusatan data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menghubungkan data empiris dan teori.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi (Denzin, 1978):

1. Triangulasi sumber, membandingkan data dari pengurus, anggota, dan pemerintah daerah.
2. Triangulasi metode, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi teori, membandingkan temuan dengan teori koperasi, teori pembangunan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, tata kelola koperasi, dan teori inovasi.

Langkah Penelitian

1. Studi pendahuluan, untuk mengumpulkan informasi awal mengenai Koperasi Desa Merah Putih.
2. Pengumpulan data lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Analisis data, mengikuti langkah Miles & Huberman (1994).
4. Penyusunan laporan penelitian, berisi potret perkembangan koperasi sebagai mockup koperasi modern.

HASIL PENELITIAN

Potret Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi nyata dari amanat UUD 1945 Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan. Hal ini sekaligus mencerminkan dukungan penuh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Dari kajian lapangan, ditemukan bahwa latar belakang pendirian Koperasi Merah Putih dilandasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas sosial. Model ini dipandang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan desa pada sektor sumber daya tak terbarukan.

Kebijakan nasional mengenai Koperasi Merah Putih pertama kali ditegaskan dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21–28 Februari 2025, di mana Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan koperasi desa sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini kemudian diperkuat melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, dengan pengumuman pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, momentum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025 ditetapkan sebagai titik peluncuran resmi gerakan koperasi tersebut. Launching ini menandai sebuah langkah besar pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, penelitian menemukan bahwa Koperasi Merah Putih mulai memberikan dampak positif, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan ekonomi desa dengan terbentuknya wadah kolektif yang menghimpun potensi masyarakat.
2. Diversifikasi usaha strategis koperasi seperti distribusi elpiji 3 kg, pupuk bersubsidi, layanan keuangan mikro (BRI Link), hingga pengelolaan hasil pertanian.
3. Sinergi lintas lembaga dengan pemerintah daerah, BUMDes, kelompok tani, PKK, dan sektor swasta.
4. Peningkatan kapasitas fiskal desa, di mana koperasi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KDMP yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis. Dukungan lintas sektor ini memberikan kekuatan kelembagaan yang kokoh bagi koperasi desa, mulai dari aspek regulasi, pendanaan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ketahanan pangan. Peran Kemenkop sebagai leading sector, Kementerian Desa dalam integrasi dengan pembangunan desa, serta Kementerian Keuangan dalam penyediaan dukungan fiskal menjadi fondasi utama keberlanjutan koperasi. Selain itu, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional mendorong koperasi menjadi penggerak utama rantai pasok pangan nasional.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi melalui dukungan pemerintah, jaminan hukum dari Kemenkumham, serta pengawasan akuntabilitas oleh BPKP semakin memperkuat posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang kredibel dan transparan. Keterlibatan BUMN membuka ruang kemitraan strategis sehingga koperasi dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan Satgas KDMP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena mendorong koperasi desa menjadi wadah kolektif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kemandirian fiskal desa.

Penelitian menemukan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mengembangkan berbagai jenis gerai usaha yang berfungsi sebagai embrio bisnis koperasi sekaligus pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Keberadaan gerai-gerai ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya bergerak dalam sektor simpan pinjam, tetapi juga merambah ke berbagai bidang strategis untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat.

Gerai sembako (Embrio KopHub) menjadi salah satu unit usaha utama yang berfungsi menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau pasar luar desa. Selain itu, hadirnya apotek desa dan klinik desa memperlihatkan bahwa koperasi juga berperan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat. Gerai kantor koperasi berfungsi sebagai pusat administrasi, pelayanan anggota, serta pengelolaan unit usaha.

Dari aspek keuangan, keberadaan gerai unit usaha simpan pinjam (Embrio Kop Bank) menjadi solusi akses keuangan mikro bagi masyarakat desa, yang seringkali kesulitan menjangkau layanan perbankan formal. Sementara itu, gerai cold storage/cold chain mendukung sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam menjaga kualitas produk agar lebih tahan lama, sehingga meningkatkan nilai jual.

Unit usaha lainnya adalah logistik dan distribusi, yang memainkan peran penting dalam rantai pasok barang, baik dari desa ke pasar maupun sebaliknya. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, koperasi mampu menekan biaya transportasi sekaligus membuka peluang pemasaran produk desa ke tingkat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan berbagai jenis gerai koperasi ini menjadi bukti bahwa Koperasi Merah Putih hadir sebagai pusat layanan ekonomi terintegrasi di desa. Inovasi unit usaha tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi desa.

Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Samarinda

Jika dikaitkan dengan implementasi di KDMP Lempake, koperasi lebih menonjol pada pengembangan gerai sembako dan logistik distribusi, mengingat posisi geografisnya yang dekat dengan pusat kota Samarinda dan menjadi jalur perdagangan antarwilayah. Lempake berperan penting dalam memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap stabil, sekaligus menjadi simpul distribusi bagi produk-produk desa di sekitarnya. Kehadiran gerai logistik di KDMP Lempake mendukung efisiensi rantai pasok barang, sehingga koperasi berfungsi sebagai penghubung antara desa dengan pasar yang lebih luas. Posisi strategis Lempake yang dekat dengan pusat Kota Samarinda mendukung perannya sebagai simpul distribusi antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan teori supply chain cooperative yang menjelaskan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai *intermediary institution* dalam menjaga stabilitas pasokan barang dan meningkatkan efisiensi distribusi (Mazzarol, 2015). Dengan demikian, peran KDMP Lempake tidak hanya sebatas penyedia barang kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai penghubung antara desa dengan pasar yang lebih luas.

Aspek kepengurusan dan tata kelola Struktur pengurus KDMP sudah terbentuk dengan jelas, terdiri dari ketua, wakil ketua (bidang usaha dan bidang anggota), sekretaris, bendahara, serta tim pengawas. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Namun, hasil penelitian bahwa perlu ada dukungan khususnya dalam bidang manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, dan perencanaan bisnis model. Dari aspek kepengurusan dan tata kelola, struktur organisasi KDMP Lempake telah sesuai dengan prinsip *good cooperative governance*, yang menurut ICA (International Cooperative Alliance, 2018) mencakup prinsip demokrasi anggota, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih ditemukan kelemahan pada aspek manajerial, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan perencanaan model bisnis. Hal ini memperkuat argumen Damanik (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi formal, tetapi juga kompetensi pengurus dalam mengelola usaha secara profesional.

Selain itu jumlah anggota koperasi saat ini mencapai 56 orang, dengan tren peningkatan dibandingkan saat awal pembentukan. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat desa terhadap koperasi mulai tumbuh. Meski demikian, tingkat partisipasi anggota dalam memenuhi kewajiban iuran simpanan pokok dan wajib masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi penguatan partisipasi anggota melalui edukasi, sosialisasi manfaat koperasi, serta insentif berbasis SHU (Sisa Hasil Usaha). Menurut Hendar & Kusnadi (2005), partisipasi anggota merupakan inti dari keberhasilan koperasi, karena koperasi adalah lembaga berbasis keanggotaan, bukan sekadar badan usaha biasa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi anggota melalui

edukasi, sosialisasi manfaat, dan insentif berbasis SHU menjadi strategi penting agar koperasi lebih kuat secara internal.

Saat ini Usaha yang Berjalan KDMP telah memulai kegiatan usaha di sektor penyediaan sembako dan tabung gas, dengan dukungan gudang yang difasilitasi oleh kelurahan. Usaha ini cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari sehingga berpotensi memberikan perputaran modal yang cepat. Hasil penelitian menunjukkan omzet koperasi telah mencapai Rp 50.000.000 per bulan, sebuah capaian awal yang positif. Namun, diversifikasi usaha masih terbatas dan sangat tergantung pada suplai dari pihak mitra.

Hasil ini sesuai dengan teori koperasi konsumsi yang menekankan bahwa koperasi dapat berkembang pesat ketika fokus pada kebutuhan sehari-hari masyarakat (Panggabean, 2016). Namun, tantangan yang muncul adalah keterbatasan diversifikasi usaha dan ketergantungan pada mitra. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi masih berada pada fase *dependent growth* (pertumbuhan yang sangat bergantung pada dukungan eksternal).

Dukungan Eksternal dan Mitra telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berupa pelatihan dan pendampingan, serta bantuan modal dari pihak luar sebesar Rp 100.000.000. Selain itu, pasokan barang dan peralatan juga diperoleh dari Pemkot dan BUMN. Fakta ini menunjukkan adanya sinergi pentahelix dalam pengembangan koperasi, meski keberlanjutan dukungan tersebut perlu dijaga dengan kinerja koperasi yang transparan dan akuntabel.

Model ini sejalan dengan pandangan Etzkowitz & Leydesdorff (2000) mengenai *Triple Helix*, yang kemudian dikembangkan menjadi *Pentahelix* untuk mendorong inovasi dan pembangunan lokal. Namun, keberlanjutan dukungan eksternal sangat ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas kinerja koperasi itu sendiri.

Bukan berarti tanpa tantangan Permasalahan dan Tantangan diantaranya Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian antara lain:

- Kepatuhan iuran anggota yang belum optimal.
- dukungan manajerial pengurus, terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan pengembangan model bisnis.
- Ketergantungan pada mitra dalam pasokan barang sehingga koperasi masih belum mandiri penuh.
- Digitalisasi usaha

Menurut ILO (2017), tantangan koperasi modern di negara berkembang adalah bagaimana mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat modal internal berbasis anggota. Oleh karena itu, strategi ke depan bagi KDMP Lempake adalah memperkuat partisipasi anggota, meningkatkan kapasitas manajemen, serta memperluas inovasi usaha berbasis digital agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa KDMP berada pada fase pertumbuhan awal dengan indikator positif berupa meningkatnya jumlah anggota, omzet usaha yang cukup tinggi, serta adanya dukungan eksternal yang kuat. Namun, keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada penguatan internal organisasi, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi pengurus, partisipasi anggota, dan diversifikasi usaha.

jumlah anggota tercatat sebanyak 68 orang yang terdiri dari 34 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk, tingkat partisipasi masyarakat yang

menjadi anggota koperasi masih sangat rendah. Persentase keanggotaan laki-laki hanya mencapai 0,270% dari total penduduk laki-laki, sedangkan keanggotaan perempuan sebesar 0,284% dari total penduduk perempuan. Secara keseluruhan, proporsi anggota koperasi terhadap total penduduk hanya 0,277%.

Temuan ini menunjukkan bahwa minat dan keterlibatan masyarakat dalam koperasi masih terbatas, meskipun terdapat keseimbangan jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan. Rendahnya persentase partisipasi dapat menjadi tantangan serius bagi koperasi dalam memperkuat basis keanggotaannya dan mengembangkan modal internal. Dengan demikian, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat koperasi serta program yang mampu menarik minat masyarakat untuk bergabung sebagai anggota aktif.

Rencana pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Lempake dalam bisnis kuliner domba dapat diarahkan pada strategi pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Kekuatan berupa ketersediaan SDM yang mumpuni, kualitas domba terjamin dari korporasi ternak, serta variasi menu reguler dan khusus menjadi modal penting untuk memperluas pasar. Dengan dukungan lokasi yang strategis di sekitar kawasan wisata Lempake, usaha ini berpotensi menjalin kerjasama dengan agen wisata, travel agent, maupun event organizer. Selain itu, momentum tingginya aktivitas masyarakat pada acara keluarga, pernikahan, aqiqah, dan kegiatan korporasi menjadi peluang besar untuk mengembangkan paket kuliner berbasis pesanan khusus, termasuk konsep sate kiloan yang sudah populer di kota besar.

Di sisi lain, kelemahan yang ada seperti kebutuhan pemasaran ekstra dan ketiadaan rencana bisnis yang terstruktur harus diatasi dengan strategi kolaboratif dan promosi digital yang terintegrasi. Pemanfaatan food vlogger dan influencer kuliner perlu dilakukan secara selektif agar mampu meningkatkan citra positif usaha sekaligus memperluas jangkauan konsumen. Untuk menjamin keberlanjutan usaha, koperasi perlu menjaga suplai domba secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan pasar dengan inovasi menu khas lokal. Dengan langkah-langkah ini, pengembangan usaha KDMP Lempake tidak hanya mampu memperkuat posisi sebagai pusat kuliner unggulan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing koperasi.

Koperasi Desa Merah Putih Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Desa Merah Putih Kutai Lama masih berada pada tahap awal pengembangan. Dari segi infrastruktur, koperasi belum memiliki gudang untuk mendukung kegiatan usaha, meskipun pemerintah desa telah menyediakan fasilitas sekretariat sebagai pusat administrasi. Keterbatasan sarana fisik ini menjadi salah satu hambatan dalam memperlancar operasional, khususnya dalam menyiapkan rantai pasok produk yang lebih teratur. Dari aspek usaha, koperasi telah mencoba menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, khususnya melalui suplai ayam dan ikan sebagai bahan utama makanan ke Perusahaan Pertamina. Namun, hingga saat ini masih menunggu respon resmi berupa surat balasan dari perusahaan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penetrasi pasar sudah dilakukan, tetapi keberlanjutan dan realisasi kerja sama masih menghadapi tantangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keanggotaan koperasi dari total populasi masih tergolong rendah, yaitu hanya 3,758% dari penduduk laki-laki dan 2,723% dari penduduk perempuan, dengan total keseluruhan 3,264% dari seluruh penduduk. Angka ini memperlihatkan bahwa koperasi belum menjadi wadah ekonomi yang diminati secara luas oleh masyarakat setempat.

Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat literasi perkoperasian masyarakat yang masih rendah, sehingga banyak warga belum memahami manfaat dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama. Kedua, kurangnya kegiatan sosialisasi dan edukasi dari pengurus koperasi maupun instansi terkait, yang menyebabkan keberadaan koperasi belum dikenal secara luas. Ketiga, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi, terutama bila pernah terjadi kasus koperasi yang tidak transparan atau gagal mengelola dana anggota. Selain itu, faktor keterbatasan akses layanan dan fasilitas koperasi yang belum merata juga dapat menghambat minat keanggotaan.

Dari sisi gender, persentase partisipasi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan menghadapi hambatan lebih besar untuk bergabung dalam koperasi, misalnya keterbatasan waktu karena tanggung jawab rumah tangga, keterbatasan modal, atau persepsi bahwa koperasi merupakan domain kegiatan ekonomi laki-laki. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan partisipasi berbasis gender yang perlu mendapat perhatian khusus.

Secara umum, rendahnya angka partisipasi ini berimplikasi pada terbatasnya basis anggota yang dapat memperkuat permodalan, jaringan usaha, dan daya saing koperasi. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan koperasi dan mengurangi potensinya sebagai penggerak ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan partisipasi anggota melalui peningkatan literasi perkoperasian, penguatan kepercayaan publik, perluasan akses layanan, serta pemberdayaan kelompok perempuan agar dapat terlibat aktif dalam koperasi. Belum adanya penambahan anggota baru menjadi indikasi bahwa koperasi belum mampu menarik partisipasi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, mekanisme simpanan anggota melalui skema simpanan pokok dan wajib juga belum berjalan efektif, sehingga koperasi masih mengandalkan tambahan modal eksternal sebesar Rp40.000.000 untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Dari segi manajemen dan kelembagaan, struktur organisasi sudah terbentuk lengkap dengan pengurus dan pengawas. Namun, kebutuhan pelatihan masih sangat mendesak, terutama terkait kepengurusan koperasi, manajemen usaha, dan laporan keuangan. Hal ini penting agar koperasi dapat meningkatkan tata kelola, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan mengelola usaha secara lebih profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha utama KDMP Tanah Datar adalah peternakan ayam petelur dengan rata-rata produksi 9 piring telur per hari (1 piring = 30 butir) dan harga jual Rp 50.000/piring. Dengan total ayam 350 ekor, koperasi dapat menghasilkan omzet ± Rp 13.500.000 per bulan. Usaha ini merupakan investasi desa yang dikelola oleh kelompok tani secara bersama, selaras dengan asas kekeluargaan yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Menurut teori koperasi produksi (Soetrisno, 2009), koperasi yang berbasis pada kegiatan produksi bersama mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi tawar petani, dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Temuan di Tanah Datar mendukung teori ini, karena produksi telur dalam skala kolektif lebih menguntungkan dibandingkan usaha individu skala kecil. Lebih jauh, keberadaan koperasi dengan usaha ayam petelur berkontribusi pada ketahanan pangan lokal, terutama dalam penyediaan protein hewani. Hal ini sejalan dengan pandangan Mubyarto (1997) bahwa pembangunan ekonomi desa harus berbasis pada pemanfaatan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, sebelum diarahkan ke pasar yang lebih luas.

Rencana pengembangan pasar desa dan penjualan tabung LPG menunjukkan strategi diversifikasi usaha koperasi, yang menurut Hendar & Kusnadi (2005) penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis usaha dan memperluas manfaat ekonomi bagi anggota. Pasar desa dapat berfungsi sebagai "local economic hub", sedangkan distribusi LPG menjadi bentuk

usaha komplementer yang memperkuat posisi koperasi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan berupa skala usaha yang terbatas, partisipasi anggota yang rendah, serta manajemen koperasi yang belum profesional. Menurut ICA (2018), keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh penerapan prinsip *good cooperative governance*: partisipasi anggota, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi usaha. Dengan demikian, KDMP Tanah Datar perlu memperkuat tata kelola internal agar mampu menjaga kepercayaan anggota sekaligus menarik dukungan eksternal yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa KDMP Tanah Datar telah menunjukkan peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa melalui peternakan ayam petelur. Namun, keberlanjutan usaha membutuhkan diversifikasi, penguatan partisipasi anggota, dan tata kelola profesional, sesuai dengan teori-teori koperasi dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

dukungan stakeholder memainkan peran penting dalam memperkuat eksistensi dan keberlanjutan Koperasi Merah Putih (KDMP) Tanah Datar. Kunjungan kerja Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri pada 21 Juli 2025 menjadi momentum strategis, karena tidak hanya melakukan launching Koperasi Merah Putih se-Kukar, tetapi juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan yang bersifat fundamental bagi pengembangan usaha koperasi.

Bentuk dukungan tersebut meliputi:

1. Dukungan pemerintah daerah (Pemkab Kukar) berupa fasilitasi kelembagaan (penyerahan NIB Koperasi Merah Putih Tanah Datar), bantuan sektor pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan Kukar, serta komitmen program *Kredit Kukar Idaman* untuk modal usaha. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi desa berbasis institusi lokal (Mubyarto, 1997), di mana peran pemerintah desa maupun kabupaten menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
2. Dukungan sektor swasta, seperti bantuan dari PT Lana Harita Indonesia, menunjukkan adanya kolaborasi model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media) dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Teori kemitraan koperasi menekankan bahwa koperasi dapat berkembang lebih cepat apabila memiliki akses kemitraan usaha dengan perusahaan dan lembaga lain (ICA, 2018).
3. Dukungan lembaga keuangan, seperti peresmian BRI Link dan kehadiran Bankaltim, Bank Indonesia Kaltim, serta OJK. Kehadiran sektor keuangan ini penting untuk memperluas akses permodalan, memperkuat transaksi keuangan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada lembaga keuangan informal.
4. Dukungan komunitas lokal, seperti PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), sekolah (SD-SMP), dan BUMDes. Hal ini memperlihatkan penerapan prinsip partisipasi anggota dalam teori koperasi (Hendar & Kusnadi, 2005), di mana keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat sekitar ikut terlibat langsung dalam aktivitas usaha.

Bupati Kukar juga menegaskan pentingnya sinergi antara koperasi dengan aparat desa, perangkat desa, serta BUMDes agar koperasi tidak dipandang sebagai pesaing, melainkan sebagai penggerak ekonomi desa. Pernyataan ini sejalan dengan konsep *cooperative as economic driver* yang dikemukakan oleh Birchall (2011), di mana koperasi berfungsi sebagai pendorong aktivitas ekonomi lokal, bukan sekadar lembaga bisnis semata.

Kedepan, dukungan stakeholder diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap inisiasi atau pemberian bantuan, tetapi juga meluas pada aspek pendampingan manajemen, pelatihan kelembagaan, dan penguatan SDM koperasi. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa SDM

koperasi masih membutuhkan peningkatan kapasitas, khususnya dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan perencanaan bisnis jangka panjang

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi untuk berkembang, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sarana prasarana, kelembagaan, partisipasi anggota, maupun akses pasar. Dukungan dari pemerintah desa, pihak ketiga, serta program pelatihan manajemen menjadi faktor penting yang dapat mendorong koperasi ini menuju kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tanah Datar menghadapi sejumlah tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara strategis. Dari sisi tantangan, koperasi masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang membutuhkan pelatihan manajemen usaha, kelembagaan, dan pencatatan keuangan agar mampu mengelola usaha secara profesional. Partisipasi anggota juga belum optimal, sehingga modal internal dan solidaritas kelembagaan masih lemah. Skala usaha yang masih terbatas pada peternakan ayam petelur berisiko menimbulkan ketergantungan pada satu sektor, sementara persaingan dengan pedagang luar desa maupun penyedia LPG swasta dapat menjadi hambatan dalam memperluas pasar. Selain itu, digitalisasi usaha belum dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pemasaran, distribusi, dan administrasi koperasi.

Di sisi lain, peluang yang dimiliki KDMP Tanah Datar sangat besar. Dukungan pemerintah daerah melalui program *Kredit Kukar Idaman*, bantuan pertanian, serta dukungan kelembagaan membuka ruang untuk mempercepat pertumbuhan koperasi. Kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga logistik seperti POS Indonesia memberikan akses pada modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Rencana diversifikasi usaha, baik dalam bentuk pengembangan pasar desa maupun distribusi LPG, memberikan peluang untuk memperluas sumber pendapatan koperasi dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor. Potensi pasar lokal untuk produk telur dan hasil pertanian juga masih tinggi, bahkan dapat diperluas hingga pasar regional. Momentum politik nasional yang mendorong pembentukan ribuan koperasi desa serta program ekspor yang digagas Pemkab Kukar pada 2026 semakin memperkuat posisi KDMP sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan mengelola tantangan internal dan memanfaatkan peluang eksternal, KDMP Tanah Datar berpotensi berkembang menjadi koperasi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih berada pada tahap awal pengembangan dengan fondasi kelembagaan yang cukup kuat—telah memiliki legalitas badan hukum, struktur organisasi, dukungan sekretariat dari pemerintah desa, serta tambahan modal awal dari pihak luar sebesar Rp40 juta—namun menghadapi berbagai keterbatasan seperti belum tersedianya gudang penyimpanan, jumlah anggota yang stagnan pada 11 orang, belum berjalannya skema simpanan pokok dan wajib, serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam hal permodalan akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Meskipun demikian, koperasi ini memiliki peluang besar melalui potensi kerja sama dengan perusahaan besar seperti Pertamina, dukungan pemerintah desa dan dinas koperasi, serta kemungkinan mengembangkan unit usaha pangan bernilai tambah, walaupun juga dihadapkan pada ancaman berupa persaingan usaha, rendahnya minat masyarakat bergabung, dan risiko ketergantungan pada investor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini memiliki

potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan apabila mampu memperkuat kapasitas internal, meningkatkan kompetensi pengurus, mendiversifikasi usaha, dan memperluas jaringan kemitraan.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kutai Lama saat ini berada pada fase pertumbuhan awal dengan pondasi organisasi yang cukup solid dan dukungan eksternal yang kuat. Struktur pengurus telah terbentuk dengan baik, keanggotaan terus meningkat hingga mencapai 56 orang, dan unit usaha sembako serta tabung gas mampu menghasilkan omzet sekitar Rp 50 juta per bulan. Namun, koperasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial pengurus, rendahnya kepatuhan anggota dalam membayar simpanan, serta ketergantungan pada mitra dalam pasokan barang. Dengan demikian, KDMP memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi koperasi yang mandiri dan berdaya saing, asalkan mampu memperkuat partisipasi anggota, meningkatkan kompetensi pengurus, serta melakukan diversifikasi usaha secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arifin, A. (2018). *Perkembangan koperasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Handayani, T. (2020). Digitalisasi koperasi dan peningkatan daya saing. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101–112.
- Hendar. (2010). *Pengantar koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat, R. (2021). Digital transformation of cooperatives in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(1), 45–57.
- International Cooperative Alliance (ICA). (1995). *Statement on the cooperative identity*. Geneva: ICA.
- Maryani, S. (2020). Peran pemerintah dalam penguatan kelembagaan koperasi pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(1), 55–66.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2004). *OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.
- Rahman, A., & Wulandari, R. (2019). Peran koperasi desa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 7(2), 88–97.

- Rochdale Pioneers. (1844). *Rochdale cooperative principles*. Rochdale: Rochdale Society of Equitable Pioneers.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A. (2018). Tantangan tata kelola koperasi daerah. *Jurnal Koperasi Indonesia*, 6(1), 23–34.
- Sutrisno, H. (2018). Partisipasi anggota dalam keberlangsungan koperasi desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(2), 67–79.
- Wahyuni, R. (2021). Model koperasi percontohan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 15–29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

